

SEJARAH OeANG REPOEBLIK INDONESIA

Dwi Ratna Nurhajarini

Abstrak

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia dilanda krisis ekonomi yang cukup parah. Jumlah uang Jepang yang beredar di masyarakat sangat banyak, ditambah lagi dengan uang NICA. Untuk mengatasi masalah inflasi dan juga untuk melengkapi atribut negara yang merdeka, Indonesia pada tahun 1946 tanggal 30 Oktober mengeluarkan uang sendiri yakni Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Sejak tanggal itu pula ORI dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan dasar hukum Undang Undang No. 17 Tahun 1946 dan Undang Undang No. 19 tahun 1946. secara politis keluarnya ORI adalah merupakan tanda kemerdekaan dan secara ekonomis sebagai usaha pemerintah untuk menyetatkan perekonomian negara.

Beredar sekitar 4 tahun saja karena keberadaan ORI berakhir tatkala pemerintah RIS mengeluarkan mata uang yang baru.

Pengantar

Sudah sejak lama uang dikenal orang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang mempunyai arti penting dalam setiap roda perekonomian suatu bangsa. Rasanya tidak mungkin membicarakan perkembangan perekonomian suatu negara tanpa memasukkan kata atau besaran uang, Walaupun dalam kenyataannya sampai saat ini barter dan media lain juga digunakan sebagai media transaksi atau sebagai substitusi uang. Berbicara mengenai definisi uang, ternyata sampai saat ini definisi yang paling banyak diterima adalah uang berdasarkan fungsinya yakni sebagai alat pembayaran. Jika kita mendasarkan fungsi uang sebagai alat bayar, kenyataannya sampai saat ini banyak sekali media yang dapat digunakan sebagai alat bayar, antara lain kartu kredit, rekening giro, cek, transfer dana dengan alat elektronik dan lainnya, yang semuanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, sejarah uang mempunyai kaitan yang erat dengan sejarah suatu bangsa, termasuk sejarah uang Republik Indonesia dan bangsa Indonesia.

Diawali dengan barang-barang yang digunakan sebagai alat tukar (untuk barter) sampai digunakannya lembaran, kepingan ataupun alat elektronik yang berfungsi sebagai alat tukar ataupun alat pembayaran. Mengingat panjangnya rentang sejarah uang di Indonesia, salah satu fenomena menarik tentang uang adalah saat Indonesia mampu mengeluarkan mata uang sendiri yakni Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) pada bulan Oktober tahun 1946.

Mata Uang Pada Awal Kemerdekaan

Pada hari-hari pertama sesudah proklamasi, ekonomi Indonesia sangat kacau. Inflasi yang cukup tinggi menimpa republik yang baru berdiri. Mata uang Jepang yang beredar di masyarakat sangat banyak, diperkirakan mata uang pendudukan Jepang yang beredar mencapai lebih dari 4 milyar rupiah.¹ Sampai bulan Agustus 1945 diduga di Pulau Jawa saja beredar sekitar 1,6 milyar rupiah. Jumlah itu makin bertambah setelah pasukan Sekutu menduduki beberapa kota besar dan menguasai bank-bank. Dari bank-

¹ *Intisari*. No. 210, 9 Januari 1981, hal. 8

bank dikeluarkan lagi uang cadangan sebanyak 2,3 milyar untuk biaya operasional dan membayar pegawai. Kas pemerintah RI boleh dikatakan kosong sedang penerimaan dari pajak dan bea lain masih belum berjalan. Sebaliknya pengeluaran semakin bertambah.

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, di Indonesia beredar beberapa jenis mata uang, yakni:

1. Mata uang pemerintah Hindia Belanda
2. Mata uang *De Javasche Bank*
3. Mata uang Pendudukan Jepang.

Mata uang Pendudukan Jepang, ada tiga macam, yakni:

Pertama mata uang yang sudah dipersiapkan sebelum menguasai Indonesia. Uang ini menggunakan Bahasa Belanda, *De Japansche Regeering*, dengan satuan Gulden, emisi tahun 1942 berkode "S".² Kedua, yang menggunakan bahasa Indonesia, *Pemerintah Dai Nippon*, emisi tahun 1943 dengan satuan rupiah, dalam pecahan bernilai 100 rupiah, bergambar pohon palem dan dibaliknya gambar petani dua ekor kerbau. Ketiga menggunakan Bahasa Jepang, *Dai Nippon Teikoku Seibu*, emisi tahun 1943, satuannya pun menggunakan rupiah. Seri yang keluar kebanyakan bergambar lingkungan alam di Indonesia dan juga budaya Indonesia, seperti pada pecahan 5 rupiah bergambar rumah adat Minangkabau yakni *Rumah Gadang* dan dibaliknya bergambar *Wanita Minang* yang memakai baju adat daerahnya. Juga pada pecahan 100 rupiah bergambar tokoh wayang orang Arjuna dan ukiran Bali di gambar sebaliknya, sedang tokoh Gatutkaca tertera pada pecahan 5 rupiah dengan gambar stupa dan Budha di sisi satunya.³

Dengan masuknya tentara Sekutu dalam rangka melucuti balatentara Jepang, pada tanggal 6 Maret 1946, Letnan Jenderal Sir Philip Christison, panglima AFNEI (*Allied Forces in Netherlands Indie*) menyatakan berlakunya Uang NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*). Uang yang bergambar Ratu Wilhelmina tersebut dipakai sebagai alat pembayaran yang sah bagi semua pihak (Indonesia, Belanda, dan juga Sekutu). keluarnya mata uang ini cukup menyulitkan perekonomian Indonesia saat itu. Akibatnya adalah naiknya harga barang-barang sehingga semakin meningkatkan terjadinya inflasi di Indonesia. Kurs penukaran ditetapkan 3%, artinya setiap rupiah Jepang dapat ditukar dengan 3 sen uang Nica.⁴

Sutan Sahrir selaku perdana menteri, memprotes tindakan Sekutu, karena pengeluaran uang tersebut berarti melanggar hak kedaulatan RI, dan juga melanggar persetujuan yang telah disepakati. Persetujuan tersebut adalah selama situasi politik belum mantap, tidak akan dikeluarkan mata uang baru untuk menghindarkan kekacauan di bidang ekonomi dan keuangan. Pemerintah menganjurkan pada seluruh rakyatnya agar menolak uang NICA sebagai alat pembayaran.

Persiapan Menjelang Keluarnya ORI

Perjuangan bangsa Indonesia pada masa perang kemerdekaan tidak saja membutuhkan tenaga, taktik dan strategi perjuangan, melainkan juga membutuhkan dana untuk mendukung perjuangan itu. Oleh karena itu, uang menjadi salah satu kunci dalam perjuangan.

² Uang pendudukan Jepang di Semenanjung Malaya berkode "M" dengan satuan *dollar*; di Filipina berkode "P" dengan satuan *pesos*; di Birma atau Myanmar berkode "B" dengan satuan *rupee*, dan di Oceania berkode "O" dengan satuan *sbilling*. Semua bentuk dan ukurannya relatif sama.

³ Wiratsongko (ed). *Bank Notes and Coins From Indonesia*. Jakarta: Perum Peruri dan Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949, 1991. hal. 2 dan 254 - 260

⁴ *Intisari*, No. 210, 9 Januari 1981, hal. 6

Pemerintah Indonesia mulai merintis dan menjajaki kemungkinan untuk membuat uang sendiri dengan membentuk sebuah tim yang bertugas mencari dan meninjau beberapa percetakan yang paling memadai untuk mencetak uang. Tim terdiri atas beberapa pegawai dari percetakan *G. Kolf & Co* Jakarta dan wakil dari percetakan di Surabaya.

Pada tanggal 7 November 1945 dengan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 3/RD, dibentuk “Panitia Penyelenggara Percetakan Uang Kertas Republik Indonesia”. Tim itu diketuai oleh TRB Sabarudin, adapun anggotanya adalah H.A. Pandelaki (Kementerian Keuangan), M. Tabrani (Kementerian Penerangan), S. Soegiono, E. Kusnadi (Kas Negara), S.E. Oesman dan Aoes Soeriatna (keduanya dari Serikat Buruh Percetakan *G. Kolf & Co*).⁵ Panitia itu bertugas menyelenggarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan percetakan uang. Selain itu dibentuk pula sebuah panitia yang bertugas untuk mempertimbangkan cara-cara menerima, menyimpan dan mengedarkan uang. Panitia itu dipimpin oleh Enang Kusnadi dari Kas Negara Jakarta.

Berdasarkan hasil temuan tim yang pertama, maka percetakan uang akan dilaksanakan di Surabaya. Namun belum sempat dimulai, di Surabaya terjadi pertempuran yang cukup hebat (kemudian terkenal dengan sebutan pertempuran 10 November 1945). Tempat percetakan akhirnya dipindahkan ke Jakarta. Di samping mempersiapkan tempat untuk mencetak uang yang juga dikerjakan oleh panitia itu adalah membuat klise uang dan juga membuat desain uang. Para pelukis yang membuat desain uang ORI yang pertama, sempat dikarantina di gedung keuangan Lapangan

Banteng selama 3 bulan.⁶ Uang yang dipersiapkan untuk dicetak bernilai 100 rupiah, 10 rupiah, 5 rupiah, 0,5 rupiah, 10 sen, 5 sen, dan 1 sen.

Ketika panitia penyelenggara pencetakan uang republik mulai bekerja, muncul permasalahan baru yakni tentang jaminan uang yang akan diedarkan. Pada umumnya pengeluaran uang memakai jaminan emas atau barang berharga lainnya, sedangkan bank di Indonesia belum sangat memenuhi syarat-syarat tersebut. Hal itu disebabkan modal yang belum tersedia, situasi negara yang masih dalam kondisi kacau karena peperangan, dan juga kurangnya tenaga ahli dalam bidang perbankan. Menghadapi permasalahan itu, Wakil Presiden Mohammad Hatta menyatakan bahwa uang baru yang akan diedarkan tidak perlu dikeluarkan oleh bank tetapi oleh pemerintah. Dasar terpenting dalam peredaran uang adalah kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya. Dengan kata lain, ORI adalah uang kertas pemerintah bukan uang kertas bank. Selain itu juga tidak didasarkan pada emas atau *a-metalisme*.

Menjelang akhir Desember 1945 segala sesuatu yang berkaitan dengan percetakan uang terpaksa dihentikan karena situasi Jakarta yang mulai panas. Ketika pemerintahan berpindah ke Yogyakarta, beberapa ratus rim uang kertas pecahan 100 rupiah yang belum diberi seri ikut pula dan beberapa karyawan yang menanganinya pindah juga ke Yogyakarta. Percetakan kemudian dilanjutkan di Yogyakarta, Solo dan Malang. Di Yogyakarta, percetakan uang dilanjutkan di Percetakan Yaker (Jalan Loji Kecil sekarang jalan Suryotomo) dan di percetakan Kanisius (Jalan Secodiningratan sekarang Jalan Senopati). Kemudian saat Yogyakarta kembali diduduki Belanda pada

⁵ Wiratsongko, *Ibid.* hal. 4

⁶ Wawancara dengan Surono tahun 1996

⁷ Dwi Ratna Nurhajarini. *Oeang Repoeblik Indonesia Peranannya Dalam Perjuangan Bangsa 1946 – 1950*. Yogyakarta: BKSNT, Depdikbud, 1999, hal. 38-42

tahun 1948 – 1949, percetakan ORI dilakukan di daerah pengungsian, yakni di daerah Selopamiro, Imogiri, Bantul.⁷

Persiapan lain dalam rangka penyehatan keuangan nasional juga dilakukan, yakni dengan Pinjaman Nasional yang berlangsung dari tanggal 15 Mei – 15 Juni 1946. Pinjaman nasional mempunyai dua arti penting, pertama untuk menarik sebagian uang pendudukan Jepang yang ada di masyarakat dan kedua untuk membuktikan pada dunia luar bahwa pemerintah Indonesia dipercaya dan didukung oleh rakyatnya.⁸

Usaha menyehatkan keuangan setelah diadakan pinjaman nasional kemudian diikuti oleh kegiatan yang lebih tegas, yakni “kewajiban menyimpan uang dalam bank”. Tindakan ini sebagai persiapan langsung dari pengeluaran uang republik. Kegiatan ini dilakukan beberapa kali, sampai beberapa hari menjelang keluarnya uang republik. Dan sampai batas akhir kewajiban menyimpan uang dalam bank, setiap orang hanya diperbolehkan memiliki uang tunai sebesar 50 rupiah uang Jepang.

Oeang Repoeblik Indonesia

Uang adalah tanda kemerdekaan negara. Dengan ada pencetakan dan mempunyai uang sendiri merupakan tindakan politis guna memantapkan identitas bangsa dan negara. Suatu negara merdeka tidak hanya cukup dengan proklamasi, punya pemerintahan, tanah air, dan rakyat. akan tetapi, juga harus mempunyai mata uang sendiri. Pernyataan Mohammad Hatta itu kemudian menjadi dasar pemikiran bagi pencetakan uang republik.⁹

Pemerintah Indonesia baru bisa mengeluarkan mata uang sendiri pada tahun 1946 melalui Undang-Undang No. 17/1946 tanggal 1 Oktober 1946. Walaupun Undang-

Undang itu dikeluarkan tanggal 1 Oktober 1946, namun pengeluaran ORI dan juga berlakunya ORI sebagai alat pembayaran yang sah tergantung keputusan Menteri Keuangan. Lewat Surat Keputusan Menteri Keuangan No. SS/1/35 tanggal 29 Oktober 1946 pukul 24.00, ORI dinyatakan berlaku sebagai alat tukar yang sah pada tanggal 30 Oktober 1946. Pengeluaran ORI ditandai dengan pidato radio Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 29 Oktober 1946. pidato tersebut antara lain berbunyi.

“.... besok pada tanggal 30 Oktober 1946, suatu hari yang mengandoeing sedjarah bagi tanah air kita. Rakjat kita menghadapi penghidoepan baroe. Besok moelai beredar Oeang Repoeblik Indonesia sebagai satoe-satoenya alat pembajaran yang sah...”.¹⁰

Penerbitan atau pengeluaran ORI dimaksudkan untuk mengganti uang Pendudukan Jepang dan uang Hindia Belanda. Dasar hukum penerbitan ORI selain Undang-Undang No. 17/ 1946 juga dipertegas dengan Undang-Undang no. 19/ 1946 tentang pengeluaran uang Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 19/ 1946 antara lain ditetapkan tentang nilai tukar ORI dengan uang Pendudukan Jepang dan juga dengan standar emas yang digunakan untuk penukaran dengan mata uang asing. Sepuluh rupiah ORI ditetapkan sama dengan emas murni seberat 5 gram. Penetapan itu dimaksudkan untuk memberi dasar harga yang tetap atas ORI, dan sekaligus digunakan sebagai dasar perhitungan yang pasti terhadap mata uang asing.¹¹ Terhadap uang Jepang, dasar penukaran ORI ditetapkan sebesar 50 rupiah uang Jepang sama dengan 1 rupiah ORI, untuk wilayah Jawa dan Madura. Sedangkan untuk wilayah Sumatra, 100 rupiah Jepang sama dengan 1 rupiah ORI.

⁸ *Revue Indonesia*, No. 15, 9 Mei 1996

⁹ *Kedaulatan Rakyat*, 22 Maret 1946

¹⁰ *Kedaulatan Rakyat* 30 Oktober 1946

¹¹ Biro Hukum dan Humas Depkeu dan PT. Asuransi Jasa Raharja, 1986

Perbedaan nilai tukar tersebut didasarkan atas pertimbangan dari BPKNIP yang menduga bahwa jumlah peredaran uang yang beredar di Sumatra lebih besar dibanding uang Pendudukan Jepang yang beredar di Jawa dan Madura. Di samping itu tingkat penghidupan di Sumatra juga lebih tinggi dibanding dengan di Jawa.

Undang-Undang No. 19/1946 juga memuat tentang pembagian uang sebesar 1 rupiah ORI pada setiap orang, dan ditambah 3 sen untuk tiap kepala keluarga.¹² Uang itu dimaksudkan sebagai modal untuk setiap orang. Adapun pertimbangan pemerintah mengenai jumlah uang 1 rupiah tersebut adalah dengan dasar bahwa pada saat itu setiap orang mempunyai uang tunai sebesar 50 rupiah uang Pendudukan Jepang. Pembagian itu juga dimaksudkan agar masyarakat tidak dirugikan. Sebelum tanggal 25 Oktober 1946, masyarakat tidak mengetahui akan adanya pembagian ORI sebesar 1 rupiah bagi setiap jiwa itu.

ORI sejak pertama kali diedarkan sampai ditarik lagi peredaran, telah terbit sebanyak lima kali. Emisi pertama ORI dicetak di Jakarta, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan AA Maramis. Emisi kedua sampai kelima dicetak di Yogyakarta (di percetakan Kanisius dan percetakan Yaker), dan tatkala percetakan dikuasai musuh terpaksa percetakan ORI dilanjutkan di daerah pengungsian, yakni di daerah Kajor Imogiri, Bantul. Emisi kedua ORI ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Yogyakarta 1 Januari 1947. Mr. AA Maramis selaku Menteri Keuangan kembali membubuhkan tanda tangannya pada ORI emisi yang ketiga, Yogyakarta 26 Juli 1947. Emisi ORI yang keempat ditandatangani oleh Menteri Keuangan ad interim Mohammad Hatta, Yogyakarta 23 Agustus 1948. Dan emisi kelima ORI atau emisi terakhir ditandatangani

oleh Menteri Keuangan Lukman Harun, Yogyakarta 17 Agustus 1949.

ORI menurut rencana akan diedarkan di Jawa, Madura, dan Sumatra sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah yang dikuasai oleh republik. Akan tetapi, akibat berbagai kesulitan karena terbatasnya komunikasi dan transportasi serta adanya pertempuran di daerah, menyebabkan ORI tidak bisa diedarkan secara merata di setiap tempat. Untuk mengatasi masalah itu, di daerah-daerah yang sulit dijangkau ORI, pemerintah tetap memberlakukan mata uang yang sah sebelum ORI yakni uang Jepang, Uang Pemerintah Hindia Belanda dan Uang *De Javasche Bank* yang dicetak sebelum tahun 1942. Oleh karena itu, di daerah Sumatra tetap berlaku Uang Pendudukan Jepang. Untuk mengatasi kekurangan uang tunai di daerah-daerah, pemerintah pusat kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19/1947 tanggal 26 Agustus 1947. Peraturan Pemerintah itu mengatur wewenang Pemerintah Daerah untuk menerbitkan tanda pembayaran yang sah, yang berlaku di daerah setempat. Uang yang diterbitkan pemerintah daerah ini kemudian dikenal dengan nama ORIDA (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah).

Pada awal peredarannya ORI mempunyai nilai yang cukup tinggi, namun hal itu tidak lama. Karena beberapa bulan setelah ORI diedarkan, harga barang-barang mulai naik. Hal itu antara lain karena barang-barang terutama barang impor tidak ada di pasaran akibat adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Di samping itu juga munculnya uang kertas palsu atau ORI palsu.¹³ Di masyarakat. ORI palsu itu diedarkan oleh NICA, agar kedudukan ORI di mata rakyat Indonesia menjadi jatuh.

ORI yang lahir ditengah berkobarnya api perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu disambut oleh rakyat Indonesia

¹² Kementerian Penerangan. *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta*. Jogjakarta: Kempen, 1955, hal. 408

¹³ *Kedaulatan Rakyat*, 14 Februari 1947

dengan antusias. Oleh sebab itu, ketika ORI pertama kali beredar, di berbagai tempat, pembagian uang sebesar satu rupiah dilakukan dengan upacara yang khidmat. Bahkan ada juga uang republik itu yang dibungkus dengan kain merah putih dan dengan selamatan. Di pusat-pusat perjuangan, uang republik disambut oleh segenap rakyat sebagai alat tukar yang membawa pesan persatuan dan perjuangan.¹⁴

Apabila dilihat dari jumlah nilainya, pembagian ORI sebesar 1 rupiah pada setiap orang itu tidak mempunyai nilai material yang besar. Namun uang tersebut mempunyai pesan dan nilai moral yang sangat besar bagi pemerintah, hal ini dapat dijadikan simbol yang bisa memperkuat kedudukan pemerintah, baik di dalam maupun di luar negeri.

Sjafruddin Prawiranegara menegaskan bahwa ORI semula dimaksudkan sebagai salah satu atribut negara yang merdeka dan berdaulat, namun dalam kenyataannya ORI telah menjadi alat perjuangan revolusi. ORI menjadi alat yang mempersatukan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk berjuang menegakkan kemerdekaan. Dalam fungsinya sebagai alat mampu membiayai tegaknya kedaulatan sebuah negara, ORI dapat disamakan dengan *continental money* yang dikeluarkan oleh negara-negara koloni di Amerika Serikat dalam rangka Perang Kemerdekaan tahun 1776 – 1783.¹⁵

Dalam hal ini ORI telah membiayai kebutuhan negara yang baru berdiri. ORI telah ikut mendukung, mengatur administrasi, mengorganisir dan memperkuat tentara, memelihara keamanan dan ketertiban serta mengurus kesejahteraan rakyat dalam berperang melawan Belanda. Perjuangan

ORI melawan uang NICA tidak bisa dipisahkan dengan perjuangan rakyat melawan Belanda. Walaupun urusan uang telah ada kesepakatan bersama bahwa antara kedua belah pihak tidak akan mengganggu penduduk yang menyimpan uang musuh, namun pihak Belanda melanggar kesepakatan tersebut. Daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda, dipaksa untuk memakai uang NICA sebagai alat pembayaran.

Dengan beredarnya dua macam mata uang yakni ORI dan uang NICA, penduduk yang berada di daerah perbatasan maupun di daerah yang dikuasai oleh Belanda mengalami kesulitan. Kurs yang berlaku di daerah pendudukan adalah kurs pasar terbuka, artinya nilai tukar antara ORI dan uang NICA dengan cara tawar menawar mengikuti harga pasar. Nilai tukar ORI terhadap uang NICA di daerah Yogyakarta pada awal tahun 1949 sangat rendah, namun keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 mendongkrak nilai ORI, dari 130:1 menjadi 90:1. Menurut George Mc. T. Kahin¹⁶, ORI yang sederhana buaatannya dengan gambar Presiden Sukarno ternyata mampu membangkitkan kekuatan besar, jauh melebihi perkiraan yang dibayangkan oleh militer Belanda. Hal itu membuktikan betapa nilai intrinsik ORI berkaitan langsung dengan keberhasilan perjuangan bangsa serta menjadi kekuatan riil dari Republik Indonesia.

Sadar akan arti pentingnya alat pembayaran dalam masa perjuangan, kemudian menimbulkan tindakan-tindakan perampasan yang dilakukan oleh pihak Belanda terhadap pihak Republik Indonesia. Mereka melakukan tindakan perampasan baik di dalam kota, maupun di jalur-jalur yang ada di luar kota. Tindakan lainnya adalah

¹⁴ Muhammad Hatta. *Kumpulan Pidato*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1981, hal. 105

¹⁵ Wiratsongko, *Op.cit.* hal. 10

¹⁶ George Mc, Kahin. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta: UNS Press bekerjasama dengan Sinar Harapan, 1995, hal. 501

apabila tentara Belanda mengetahui rakyat mempunyai ORI, maka uang tersebut dirampas dan disobek-sobek.

Adanya berbagai tekanan dan paksaan yang dilakukan oleh pihak Belanda, menyebabkan rakyat terutama para pedagang secara diam-diam mau juga menerima uang NICA, di samping tetap menggunakan ORI. Para pedagang umumnya mencari amannya saja, bila diketahui ada tentara Republik Indonesia datang maka yang memiliki uang NICA segera menyembunyikan. Sedangkan bila ada patroli dari Belanda, mereka segera menyimpan uang ORI. Kenyataannya uang NICA hanya beredar di dalam kota, untuk luar kota rakyat tetap menggunakan uang Republik (ORI). Namun para pedagang yang ada di kota terutama golongan Tionghoa, lebih senang menerima ORI daripada menerima uang NICA. Sebab dengan ORI mereka bisa membeli beras dari petani.

Berkaitan dengan politik perjuangan di Yogyakarta yang ada kaitannya dengan ORI, Sultan Hamengkubuwana IX menegaskan sebagai berikut:

“... agar rakyat dan semua instansi perdjoeangan menolak beredarnya wang Federal dan ambil tindakan dimana perlu. Sebaliknya Wang ORI harus dipakai sebagai suatu mata wang yang berlaku dan harus dihargai.¹⁷”

Dengan adanya instruksi tersebut rakyat Yogyakarta baik yang ada di desa maupun di kota banyak mentaatinya. Bahkan di Pasar Ngasem rakyat dengan gigih mempertahankan uang ORI. Sultan juga berhasil mempengaruhi pedagang Thionghoa, sehingga golongan tersebut tidak ragu-ragu menerima ORI.¹⁸

Pihak Belanda dalam usahanya untuk menyebarkan uang NICA antara lain dengan cara menggaji para pegawai yang ada di daerah pendudukan dengan uang NICA. Sebagian besar kebutuhan hidup sehari-hari hanya dapat dibeli dengan ORI, maka para pegawai di daerah pendudukan harus menukarkan uang NICA dengan ORI. Uang NICA hanya dapat dibelanjakan untuk membeli benda-benda atau barang-barang seperti sabun, teh, makanan kalengan atau benda-benda pos.¹⁹

Keberadaan ORI yang lahir dalam suasana revolusi harus berakhir tatkala Pemerintah RIS mengeluarkan mata uang baru. Walaupun ORI mempunyai masa edar yang relatif pendek namun keberadaannya telah menandai sebuah era baru dalam sistem moneter di Indonesia. Di samping itu ORI juga berperan dalam perjuangan melawan Belanda, dan fungsi utama sebagai alat pembayaran dan alat tukar tentunya tetap melekat pada ORI.

Daftar Pustaka

Ajip Rosidi, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*. Jakarta: Inti Idayu Press.

Arsip Daerah No. 89.

Dwi Ratna Nurhajarini, 1999. *Oeang Repoeblik Indonesia Peranannya dalam Perjuangan Bangsa 1946 – 1950*. Yogyakarta: BKSNT, Depdikbud.

¹⁷ *Arsip Daerah No. 89*

¹⁸ P.J. Suwarno. *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942 – 1974: Sebuah Tinjauan Historie*. Yogyakarta: Kanisius, 1994, hal. 250 -25

¹⁹ Intisari. *Loc.cit*

Iswardono Sp, 1981. *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFÉ.

Kahin, George Mc.T., 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta: UNS Press bekerja sama dengan Sinar Harapan.

Kementerian Penerangan, 1953. *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta*.

Mohammad Hatta, 1947. *Sepoetar Pengeloearan ORI*. Djakarta.

Mohammad Hatta, 1981. *Kumpulan Pidato*, Jakarta: Yayasan Idayu.

P.J. Suwarno, 1994. *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942 – 1974: Sebuah Tinjauan Historis* . Yogyakarta: Kanisius.

Wiratsongko (ed). *Bank Notes and Coins from Indonesia*. Jakarta: Perum Peruri dan Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949.

Surat Kabar dan Majalah

Kedaulatan Rakyat, 22 Maret 1946

Kedaulatan Rakyat, 30 Oktober 1946

Kedaulatan Rakyat, 14 Februari 1947

Intisari, No. 210, 9 Januari 1981

Revue Indonesia, No. 15, 9 Mei 1946